

kiprah agroforestri



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

ICRAF
Indonesia

Volume I No. 1 - Agustus 2008

Sekapur Sirih

We believe that a global agroforestry transformation will create practical options for people and the environment in the developing world. But the necessary scale of this transformation will be realized only if we deepen our engagement with all of our valued stakeholders.

The World Agroforestry Centre Strategy / 2008-2015

Ungkapan di atas adalah salah satu pesan yang terkandung dalam dokumen Strategi Organisasi yang akan menjadi pedoman kami berkiprah dalam kegiatan penelitian dan pembangunan global untuk kurun waktu 7 tahun mendatang.

Kami yakin bahwa penelitian yang telah dan akan kami lakukan dalam bidang agroforestri mampu memberikan berbagai pilihan praktis yang berguna bagi masyarakat dan lingkungan. Hanya saja, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu mempererat keterlibatan dengan mitra kerja di berbagai tingkatan, mulai dari petani yang bekerja di lahan sampai dengan para pembuat kebijakan di pusat-pusat pemerintahan.

Tahun ini, kiprah World Agroforestry Centre (ICRAF) di Indonesia memasuki satu setengah dasawarsa. Pemahaman masyarakat luas akan pentingnya penelitian yang telah kami lakukan semakin kuat. Oleh karena itu, kami tetap harus (1) memfokuskan pekerjaan pada penelitian mengenai pohon, lahan, dan juga manusia yang menggarapnya serta kebijakan yang mempengaruhinya. Di lain sisi, sudah saatnya kami (2) menegaskan peran dalam menerjemahkan hasil-hasil penelitian menjadi informasi yang praktis dan bisa diterapkan, baik oleh mereka yang bekerja di lahan (petani) maupun yang bekerja di belakang meja (pembuat kebijakan).

Lembar informasi yang kami terbitkan setiap 3 bulan ini dimaksudkan untuk mengantarkan berita dan cerita kepada pembaca mengenai apa yang sudah dan sedang kami lakukan dalam mewujudkan kedua fokus kerja di atas. Semoga berkenan.

Selamat membaca!

Meine van Noordwijk
Regional Coordinator



DAFTAR ISI

Katuk & Kucai untuk Jakarta	2
Mengukur Karbon di Lahan	3
Penelitian untuk Kebijakan	5
Forum SIG Aceh Barat	6
Ngobrol Santai: Working Group - Tenure	7



Katuk & Kucai

Foto: Denta Anggakusuma

untuk Jakarta

“Keduanya harus serentak,” jawab Haji Udi, petani dari Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Bogor, ketika ditanya mana yang lebih dahulu dikerjakan, bercocok tanam ataukah memastikan tersedianya pasar tempat menjual hasil. Umum diketahui bahwa selama ini berbagai pihak telah membantu petani meningkatkan hasil pertanian, tetapi saat panen tiba petani kebingungan karena tidak tahu kemana akan menjual hasilnya. Pasar tidak disiapkan!

Dari pengalaman tersebut, tim peneliti dari World Agroforestry Centre (ICRAF) mencoba membantu petani dengan menerapkan pendekatan terbalik, yaitu menyiapkan pasar sebelum memulai proses produksi. Bersama Institut Pertanian Bogor, ICRAF melaksanakan Proyek Penelitian dan Pengembangan Sayuran di Lahan Wanatani yang merupakan bagian program bertajuk *Sustainable Agriculture and Natural Resource Management* atau SANREM atas dukungan dana USAID (*United States Agency for International Development*).

“Kurangunya informasi pasar, terpeencilnya lokasi produksi, serta buruknya akses ke lokasi tersebut, merupakan permasalahan umum yang dihadapi petani,” demikian jelas Iwan Kurniawan – peneliti pemasaran ICRAF.

Bersama timnya, Iwan membantu petani mengumpulkan informasi pasar secara cepat melalui metode RMA atau *Rapid Market Appraisal*. Dengan metode ini, petani akan dapat memahami kompleksitas pasar yang akan menjadi pedoman dalam menentukan keputusan produksi.

“Melalui RMA kita juga dapat mengetahui produk pertanian apa yang sedang diminati pasar, kualitas maupun kuantitasnya, kapan dan

dimana permintaan tersebut muncul, serta harga yang berlaku.”

Untuk desa Parakan Muncang, Hambaro, dan Sukaluyu di Kecamatan Nanggung yang menjadi lokasi penelitian ICRAF, tim peneliti menyarankan pengembangan sayuran katuk (*Sauropus androgynusi*) dan kucai (*Allium tuberosum*). Kedua jenis sayuran ini banyak dicari warga Jakarta. Dengan biaya investasi yang relatif rendah, harga jual juga relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan dengan jenis sayur lain.

Sebanyak 6 plot di ketiga desa tersebut dijadikan lahan uji coba untuk mengumpulkan data produksi dan potensi keuntungan. Dalam uji coba ini, sebanyak 60.000 stek katuk dan 50 kg bibit kucai disebar di ketiga desa tersebut. Untuk memastikan penyerapan pasar, kerjasama dibangun dengan seorang pedagang sayur dari Jakarta (Pasar Cengkareng) yang setuju membeli semua sayur katuk dan kucai yang diproduksi oleh petani.

Seorang petani desa Sukaluyu bernama Pak Arsyad turut menyediakan lahannya dalam proyek uji coba penanaman sayur katuk. Dia mengatakan bahwa selama ini dia mengikuti apa

yang diarahkan ICRAF mengenai cara-cara menanam dan memupuk. “Kelak bila berhasil, kami diwajibkan menggulirkan bantuan yang kami terima kepada petani lainnya,” jelas Pak Arsyad.

Tanggal 2 Juni lalu, bersama dengan sekitar 100 petani dari ketiga desa lokasi penelitian, Haji Udi dan Pak Arsyad menghadiri pelatihan “Pasca Panen Sayuran Katuk” yang diadakan di Agromedika – lokasi penelitian dan pengembangan tanaman obat seluas 2 hektar milik PEMDA Kabupaten Bogor di Desa Hambaro di bawah pengelolaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pelatihan ini bertujuan untuk mengenalkan teknik memanen dan mengikat katuk kepada para petani peserta program.

Beberapa petak lahan di Agromedika juga merupakan lokasi uji coba penanaman sayur katuk. Selama pelatihan, para peserta diajak melihat langsung cara memanen katuk di lahan tersebut. Di bagian lain lokasi Agromedika, para peserta mempelajari teknik mengikat katuk.

Membahas masa depan Kecamatan Nanggung dalam hal produksi sayur mayur, Iwan menjelaskan, “Bila proyek ini berhasil, di Kecamatan Nanggung akan dibentuk suatu badan pengelola tata niaga dan

produksi sayur mayur (*Nanggung Agro Enterprise*) yang beranggotakan para petani dan pedagang. Badan ini akan berperan menentukan komoditas yang akan ditanam sesuai dengan kebutuhan pasar, menentukan patokan harga, dan merupakan ajang pertemuan petani dan pembeli. Masalah kurangnya informasi pasar dan jauhnya lokasi produksi akan dapat ditanggulangi.”

Bersama rekan peneliti lainnya, Iwan berharap petani Nanggung memiliki alternatif meningkatkan pendapatannya. Permasalahan banyaknya pemuda dan pemudi Nanggung yang pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan diharapkan juga bisa dipecahkan bila bertanam sayuran mampu memberikan hasil yang kompetitif. [AF/IK]

Informasi

Iwan Kurniawan
Telp: 0251 8 625 416 Ext. 798
Email: k.iwan@cgiar.org

FAKTA TENTANG KATUK & KUCAI

1. Bisa ditanam di bawah naungan (20-25% untuk katuk) dan menjanjikan hasil bagus bagi petani;
2. Dalam 12 bulan terakhir, permintaan pasar dan harga relatif stabil (antara Rp. 2.000 – Rp. 2.500 per kilogram);
3. Panen katuk sekitar 4-5 ton per hektar, dapat dipanen 5-6 kali dalam setahun (ditanam di hamparan terbuka bersama singkong). Panen singkong bisa mencapai 8-9 ton per tahun;
4. Panen kucai sekitar 7,6 ton per hektar, dapat dipanen 7-8 kali per tahun (ditanam pada hamparan terbuka tanpa naungan);
5. Masa produksi katuk bisa mencapai 10 tahun sementara kucai 5 tahun sebelum diganti tanaman baru;
6. Pada tahun pertama, katuk menyumbang pendapatan petani sekitar Rp. 9,7 juta per hektar per tahun. Untuk tahun selanjutnya, bisa mencapai 2 kali lipat. Sedangkan kucai sebesar Rp. 26 juta per hektar per tahun;
7. Anggota kelompok perempuan bisa memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp. 19.000 per hari dari pekerjaan membersihkan, memilah dan mengikat katuk.

Mengukur Karbon di Lahan

“Jalannya yang lurus Mat. Jangan belok-belok,” teriak Taryono kepada Rachmat yang sedang menarik ujung pita ukur. Rachmat menoleh dan tersenyum. Rupanya dia berjalan melenceng terlalu ke kanan. Keduanya sedang membuat plot berukuran 40 X 5 meter di areal hutan di komplek perkantoran CIFOR Bogor tempat mereka melakukan praktek mengukur karbon dan analisa vegetasi. Tidak jauh dari mereka, Arwin bersama beberapa rekannya sibuk mementangkan tali rafia penanda plot praktek pengukuran.

Setelah menyelesaikan dua plot berukuran sama, Taryono, Rachmat, Arwin, dan empat rekan lainnya membagi diri menjadi dua kelompok dan menuju plot masing-masing. Anggota kelompok berbagi tugas: mengukur diameter dan memperkirakan tinggi pohon serta mengidentifikasi jenis spesiesnya. Salah seorang anggota kelompok bertugas mencatat data. Terdengar senda gurau riang ketika mereka berdebat menentukan pohon yang masuk kriteria untuk diukur. Pohon-pohon

dengan diameter di bawah 5 cm tidak perlu diukur karena termasuk kelompok tumbuhan bawah. Ada cara lain untuk mengukur karbon yang tersimpan di dalamnya.

Taryono dan keenam rekannya adalah staf Yayasan Puter yang beralamat di daerah Kedung Badak, Bogor. Tanggal 8 sampai 10 Juli 2008 lalu mereka mengikuti pelatihan teknik pengukuran karbon dan analisa vegetasi yang difasilitasi oleh World Agroforestry Centre (ICRAF).



Foto: Annul Fatmazi

Pelatihan yang diadakan selama tiga hari tersebut merupakan permintaan dari Yayasan Puter. "Saat ini yayasan kami sedang menjalin kerja sama dengan lembaga CIMTROP Universitas Palangkaraya untuk melakukan beberapa penelitian di hutan gambut Kalimantan Tengah," jelas Taryono yang menjabat sebagai Direktur Program Yayasan Puter.

"Kami selaku mitra CIMTROP merasa sangat perlu memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan survei atau penelitian, terutama dalam hal pengukuran karbon tersimpan dan alaisa vegetasi. Pengalaman yang kami peroleh dari pelatihan ini akan sangat berguna sebagai bahan dalam melakukan diskusi di lapangan maupun saat melakukan analisa hasil."

Fasilitator pelatihan, Subekti Rahayu atau yang biasa dipanggil Bu Yayuk, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta latih. "Hari pertama berupa penyampaian materi mengenai cara pengukuran karbon tersimpan dan analisis vegetasi. Hari kedua praktek lapangan dan hari ketiga pengolahan data," jelas Bu Yayuk.

Sebelumnya, pelatihan sejenis pernah diadakan oleh ICRAF di beberapa tempat. Pada bulan Oktober 2003 tim peneliti ICRAF yang terdiri dari Desi Suyamto, Kusuma Wijaya dan Subekti

Rahayu memberikan pelatihan kepada staf CARE Indonesia di Nunukan, Kalimantan Barat. Selanjutnya, bekerjasama dengan Conservation International Indonesia, ICRAF juga menyelenggarakan pelatihan bagi staff dan relawan organisasi konservasi ini di Bodogol, Sukabumi pada bulan Maret 2005.

Pertengahan tahun 2007, tim fasilitator ICRAF dan Universitas Brawijaya yang terdiri dari Dr. Meine van Noordwijk, Prof. Dr. Kurniatun Hairiah, Betha Lusiana dan Subekti Rahayu berangkat ke Gorontalo, Sulawesi Utara untuk memberikan pelatihan bagi staf Yayasan YANI (Yayasan Adudu Nantu Indonesia) yang bermaksud mengukur karbon di kawasan hutan Nantu.

Awal tahun 2008, ICRAF kembali bekerjasama dengan Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya untuk mengadakan pelatihan pengukuran karbon di tingkat plot dan ekstrapolasinya ke tingkat bentang lahan menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografi) bagi peserta nasional dari berbagai lembaga penelitian, perguruan tinggi dan LSM. Pelatihan di Malang, Jawa Timur tersebut diadakan dalam rangka implementasi program RaCSA (*Rapid Carbon Stock Appraisal*) yang dikembangkan oleh ICRAF,

Keahlian ICRAF dalam teknik pengukuran karbon diungkapkan oleh Guru Besar Jurusan Tanah Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. Kurniatun Hairiah.

"Mempelajari neraca karbon di alam ibaratnya mengamati keuangan di mesin ATM.... ada karbon yang disimpan (saldo) dan ada pula yang dilepaskan ke atmosfer. Teknik pengukuran karbon yang dilakukan ICRAF sama halnya dengan mengukur saldo uang, artinya mengukur karbon yang 'tersimpan' pada suatu lahan. Pendekatan ini jauh lebih mudah dari pada mengukur lalu lintas keluar masuknya karbon ke lahan melalui fotosintesis dan emisi CO₂ yang selalu berubah setiap saat. Pada tahun 1994 teknik pengukuran karbon ini diperkenalkan oleh kelompok peneliti dari TSBF (*Tropical Soil Biology and Fertility*, di Kenya) yang tergabung dalam kegiatan penelitian Alternatif Tebang Bakar (*Alternatives to Slash and Burn*) bertaraf internasional yang dikoordinir oleh ICRAF. Teknik tersebut telah diuji di tiga negara yang terpilih yaitu Indonesia, Kamerun dan Peru. Hasilnya telah banyak disitir dalam laporan ilmiah IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) sebagai dasar pertimbangan kebijakan penanganan pemanasan global di tingkat internasional. Sebagai upaya penyebar luasan teknik pengukuran karbon ini, ICRAF telah melakukan pelatihan di beberapa negara Asia lainnya antara lain Thailand, Vietnam dan Filipina". [AF/SR/KH]

Informasi

Subekti Rahayu
Telp: 0251 8 625 416 Ext. 755
Email: s.rahayu@cgiar.org



Bersama Subekti Rahayu, Prof. Kurniatun menulis buku berjudul "Petunjuk Praktis: Pengukuran Karbon Tersimpan di Berbagai Macam Penggunaan Lahan". Buku ini memberikan informasi mengenai latar belakang mengapa karbon tersimpan perlu diukur. Secara rinci, buku ini memaparkan cara mengukur karbon tersimpan pada tingkat plot maupun di tingkat kawasan, sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi petugas lapangan dan pengambil kebijakan dalam memahami masalah perubahan iklim global.

Selain itu, Prof. Kurniatun bersama Dr. Meine van Noordwijk dari ICRAF menulis bahan ajar sederhana yang dilengkapi dengan seri slide tentang Karbon Daratan dan Pemanasan Global. Bahan yang sama juga tersedia untuk perguruan tinggi dan dapat diakses di www.worldagroforestry.org/SEA/Publications/index.asp.



Penelitian untuk

Kebijakan

“Pelatihan itu sangat berguna bagi saya karena mengajarkan bagaimana memanfaatkan hasil-hasil penelitian dalam pembuatan kebijakan,” ungkap Yongky Indrajaaya, peneliti dari Balai Penelitian Kehutanan Ciamis, lembaga yang berada di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Departemen Kehutanan.

Yongky baru kembali dari Bangkok, Thailand setelah mengikuti pelatihan “Analisa Kebijakan dan Komunikasi Efektif” yang diadakan pada tanggal 23-27 Juni 2008 lalu. Keikutsertaannya dalam pelatihan tersebut didukung oleh SEANAPE (Southeast Asian Network for Agroforestry Education) – salah satu program World Agroforestry Centre (ICRAF). SEANAPE merupakan jaringan kerjasama pendidikan agroforestri di Asia Tenggara dengan anggota lebih dari 85 universitas di Indonesia, Laos, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

ungkap Jess Fernandez, manager program SEANAPE yang menggagas EFPE.

Antara Juli dan September 2008, bersama empat rekan dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jambi, and Universitas Lampung, Yongky akan mengemas ulang hasil-hasil penelitian di tempat kerjanya dalam bentuk laporan penelitian kebijakan. Setelah itu, mereka akan mengikuti lokakarya penulisan dan komunikasi kebijakan serta pengembangan materi ajar di Yogyakarta pada bulan Oktober 2008.

Walaupun bukan berasal dari lembaga pendidikan, lembaga yang menjadi target program SEANAPE, Yongky mengatakan keterlibatan dalam program ini merupakan kesempatan bagus untuk mengembangkan kerjasama BALITBANG dengan universitas-universitas di Indonesia.

Yongky juga berharap nantinya akan dapat memberikan sumbangan kepada BALITBANG dalam merancang cara yang efektif untuk mengkomunikasikan hasil penelitian lembaga tersebut kepada para pembuat kebijakan. [JF]



Foto:
Jess Fernandez

Informasi

Jess Fernandez
Telp: 0251 8 625 416 Ext. 795
Email: j.c.fernandez@cgiar.org

Pelatihan yang dihadiri Yongky merupakan salah satu kegiatan EFPE atau *Enhancing Forest Policy Education*. EFPE bertujuan meningkatkan kapasitas staf pengajar berbagai universitas di negara-negara anggota SEANAPE dalam mengajarkan mata pelajaran analisa kebijakan kehutanan, teknik komunikasi, dan penyusunan bahan ajar dalam bahasa setempat.

“Peningkatan kapasitas dalam bidang analisa kebijakan dan komunikasi bermanfaat bagi formulasi kebijakan yang efektif,”

Pojok Publikasi

Panduan Pembangunan Kebun Wanatani Berbasis Karet Klonal

Oleh: Budi, dkk. (2008)

Berisi panduan teknis pembibitan, penanaman, perawatan, dan penyadapan karet klonal untuk meningkatkan produktifitas sekaligus menjaga keanekaragaman hayati kebun karet.

Informasi

Melinda Firds
Telp: 0251 8 625 415 Ext. 756
Email: m.firds@cgiar.org





Forum SIG Aceh Barat

Walaupun belum resmi terbentuk karena masih menunggu pengesahan lewat SK Bupati, Forum SIG (Sistem Informasi Geografis) Aceh Barat sudah memiliki kapasitas yang memadai untuk memulai tugasnya. Tugas yang akan diemban antara lain meliputi penyusunan basis data spasial Kabupaten Aceh Barat yang akan digunakan untuk memberi dukungan terhadap proses perencanaan tata ruang di kabupaten tersebut .

Forum terdiri dari 20 anggota yang berasal dari berbagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Barat. Keterwakilan berbagai SKPD dalam Forum juga dinilai sangat positif mengingat perlunya integrasi data spasial antar berbagai institusi pemerintahan. Forum diharapkan berperan sebagai pusat manajemen data.

Permasalahan manajemen data seperti itulah yang menjadi titik awal pelatihan perencanaan wilayah yang diselenggarakan sebagai jawaban atas permintaan PEMDA Aceh Barat kepada ICRAF. Pertemuan 2007 lalu, dua staf ICRAF – Dr. Laxman Joshi dan Dr. Sonya Dewi – mengadakan pertemuan dengan Kepala BAPPEDA dan Wakil Bupati Aceh Barat. Dalam pertemuan tersebut, terdapat keinginan PEMDA untuk dibantu meningkatkan kapasitas stafnya dalam hal perencanaan wilayah.

“Formalisasi sebuah forum penyedia data spasial bagi perencanaan wilayah mungkin baru pertama kalinya di Indonesia. Kapasitas dari segi perangkat keras (*hardware*) pun sudah tersedia dengan adanya laboratorium SIG di Kantor BAPPEDA yang dibangun dengan bantuan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh. Pada awalnya, gagasan pembentukan forum ini muncul dari diskusi dengan peserta pelatihan tentang sistem informasi geografis yang kami adakan di Meulaboh,” jelas Andree Ekadinata dari World Agroforestry Centre (ICRAF).

Pelatihan yang dimaksud Andree adalah pelatihan tiga seri yang merupakan bagian dari aktivitas ReGRIN, dengan tujuan untuk membangun kapasitas sumber daya manusia dalam aspek perencanaan

wilayah melalui penggunaan aplikasi sistem informasi geografis. ReGRIN sendiri, adalah sebuah kegiatan penelitian ICRAF di Aceh Barat yang bertujuan mengembangkan berbagai jenis pohon bernilai ekonomi tinggi yang mampu bertahan dari bencana seperti tsunami.

Pelatihan seri pertama pada bulan November 2007, memperkenalkan dan membahas sistem informasi geografis pada 20 orang peserta dari berbagai instansi pemerintah yang sebagian besar masih belum mengenal SIG. Selanjutnya, pada bulan Mei 2008, diadakan pelatihan seri kedua tentang penginderaan jauh. Pelatihan seri terakhir dilakukan pada bulan Juli 2008 dengan pokok bahasan analisa spasial untuk perencanaan wilayah. Untuk semua pelatihan tersebut, ICRAF menyiapkan modul pelatihan dalam bahasa Indonesia.

Secara umum, sasaran pelatihan adalah agar peserta menguasai teknik pembuatan, pemrosesan, analisa, interpretasi dan pengelolaan data-data spasial. Salah satu sisi yang menarik dari pelatihan ini adalah perangkat lunak yang digunakannya. Para peserta dilatih untuk menggunakan software ILWIS, sebuah software SIG *open source* yang tersedia secara gratis.

“Perangkat lunak *open source*, banyak memberikan kemudahan. Terutama dari sisi biaya dan lisensinya. Tidak akan semudah itu bila menggunakan perangkat lunak komersial yang harganya cukup mahal dengan lisensi terbatas satu perangkat komputer saja. Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau menggunakan perangkat lunak komersial bagi 20 orang anggota Forum? Dengan

menggunakan perangkat lunak *open source*, kita juga terhindar dari perilaku pembajakan,” papar Andree.

Sepanjang penyelenggaraan pelatihan, ICRAF bekerjasama dengan para peserta dan unsur-unsur pemerintah daerah Aceh Barat dari berbagai SKPD. Para peserta terlibat langsung dalam persiapan pelatihan dan pengaturan logistik.

Syahril, Kepala Bidang Perekonomian dan Litbang BAPPEDA, dalam sambutannya pada penutupan seri pelatihan Sistem Informasi Geografis, mengemukakan harapan bahwa Forum ini dapat membantu pemerintah kabupaten dalam berbagai tugas yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di berbagai bidang , diantaranya: rencana tata ruang, pengembangan pertanian dan pembangunan fasilitas layanan publik.

Bagi ICRAF, terlaksananya pelatihan yang mampu melahirkan Forum SIG merupakan sebuah pelajaran berharga. “Pelatihan akan sukses bila didasarkan pada kebutuhan nyata peserta. Keterlibatan mereka dalam persiapan dan pelaksanaan juga sangat penting.”

Pembentukan Forum GIS yang murni didasarkan pada gagasan pemerintah daerah Aceh Barat merupakan contoh yang sangat baik. Peserta membuat sendiri proposal pembangunan Laboratorium SIG dan menghubungi BRR. ICRAF membantu permasalahan teknis mengenai seluk beluk peralatan dan perangkat yang diperlukan untuk meabangun fasilitas tersebut. Pengajuan pengesahan Forum melalui SK Bupati juga atas inisiatif para peserta. [AF/AE]

Informasi

Andree Ekadinata
Telp: 0251 8 625 416 Ext. 744
Email: a.ekadinata@cgiar.org

Ngobrol Santai:

Working Group - Tenure (WGT)

'Ngobrol' yang direncanakan setengah jam, molor hingga satu setengah jam. Martua Sirait bercerita tentang Working Group – Tenure, sebuah kelompok kerja yang berkiprah dalam masalah konflik penguasaan tanah di kawasan hutan. Martua menjabat sekretaris dalam Badan Pengurus WG-Tenure mewakili perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Saat ini, Martua sedang menyiapkan disertasi doktoralnya di Institute of Social Studies (ISS) Den Haag yang mengambil tema penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan. Berikut adalah petikan dari bincang-bincang di Café CIFOR, Bogor, sore tanggal 23 Juli 2008 lalu.

Apakah WG-Tenure?

WG-Tenure itu kelompok kerja multipihak yang beranggotakan sekitar 30 lembaga, terdiri dari badan usaha kehutanan, pemerintah dari berbagai sektor, organisasi rakyat dan organisasi non pemerintah yang memiliki cita-cita tinggi yaitu menyelesaikan kasus-kasus konflik pertanahan di kawasan hutan, baik di hutan lindung, produksi, konservasi, maupun di wilayah yang dikecualikan dari kawasan hutan.

Apakah cita-cita itu sudah tercapai?

Arah ke sana sudah ada. Para pihak sudah mulai belajar meninggalkan cara-cara kekuasaan dan mulai memahami karakteristik dan tipologi penyelesaian konflik yang beragam. Paling tidak WG-Tenure menjadi wadah belajar bersama dan bertanya tentang berbagai masalah konflik penguasaan tanah di kawasan hutan. Awal 2007 sebuah buku terbitan WG-Tenure dan Departemen Kehutanan lahir dari kalangan swasta menunjukkan bahwa masalah ini bukan masalah organisasi rakyat dan ornop saja, tetapi masalah kita bersama. [Buku yang dimaksud berjudul "Konflik Sosial Kehutanan: Mencari Pemahaman untuk Penyelesaian Terbaik". Penulisnya adalah Lisman Sumardjani, seorang anggota WG-Tenure dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Pada pertengahan 2006, diterbitkan buku lain dari anggota WG-Tenure dari kalangan akademisi berjudul "Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah; Permasalahan dan Kerangka Tindakan, oleh Arnoldo Contreras-Hermosilla & Chip Fay (ICRAF)].

Apa saja kegiatan WG-Tenure?

Kami mengadakan *round table discussion* membahas berbagai permasalahan konflik pertanahan di kawasan hutan dan berbagi pengalaman dalam menyelesaikan konflik. Pada bulan November 2007, dilakukan *roundtable discussion* ke III dengan tema Permasalahan Tenurial dan Reforma Agraria di Kawasan Hutan dalam Perspektif Masyarakat Sipil. Bulan Juni 2008 lalu (Kantor BAPLAN Bogor), kami membahas PP 3/2008 yang merupakan revisi PP 6/2007. Selain itu, WG-Tenure menerbitkan majalah 3 bulanan 'Warta Tenure' dan semua publikasi serta proses belajar yang dibangun dapat diunduh di website WG-Tenure www.wg-tenure.org. WG-Tenure juga bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti ICRAF dan HuMa dengan dukungan dana dari *Partnership for Governance Reform*. Saat ini WG Tenure melakukan pelatihan *Rapid Land Tenure Assesment (RaTA)* untuk memahami tumpang tindih klaim di kawasan hutan.

Sekretariat

Gedung Badan Planologi Kehutanan
Jl. Juanda No. 100 BOGOR 16123
Telp/Fax: 0251 8 381 384
email: wg_tenurial@cbn.net.id
website: www.wg-tenure.org

Mengapa persoalan tenure dianggap sensitif?

Membuka isu-isu konflik pertanahan di kawasan hutan adalah seperti membuka kotak pandora. Ada kecemasan karena kita tidak siap mengetahui isi kotak. Kita cenderung menabukan perbincangan mengenai perbedaan atau konflik, padahal pengelolaan hutan mensyaratkan penyelesaian konflik penguasaan tanah guna tercapai pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Terlebih lagi di masa Orde Baru hanya ada satu interpretasi yang diakui, yaitu interpretasi oleh negara. Syukurlah saat ini para pihak sudah paham



Foto: Tri Astruamadaja

Martua Sirait

m.sirait@cgiar.org

Peneliti dan analis kebijakan ICRAF sejak 1997 dan saat ini mengajar di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Meneliti kebijakan pertanahan dan penguasaan tanah, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Memfasilitasi dialog-dialog kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat antara lain di Kabupaten Lampung Barat dan Kutai Barat.

Juga memberikan bantuan teknis tentang analisa kebijakan lahan bagi beberapa lembaga non-pemerintah.



Foto: Aunul Fauzi

bahwa konflik penguasaan tanah di kawasan hutan merupakan hal yang harus dipecahkan. TAP MPR no 9/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam memandatkan hal ini. Departemen Kehutanan dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah memasukkan masalah ini dalam prioritas kerjanya.

Alat apa yang diperlukan dalam penyelesaian konflik?

Nah, disinilah peran anggota untuk mengisi dengan pemahaman-pemahaman baru. Sebagai lembaga penelitian, ICRAF dan lembaga lainnya memiliki sumberdaya untuk mengkaji permasalahan tersebut. Saat ini ICRAF dan mitranya mengembangkan RaTA (*Rapid Land Tenure Assesment*) – sebuah alat untuk mengetahui secara cepat apakah ada tumpang tindih penguasaan atas tanah. Metode ini dikhususkan pada wilayah-wilayah dimana konflik penguasaan tanah belum mencuat (konflik laten). Sedangkan metode HuMa-Win yang dikembangkan oleh anggota WG-Tenure yang lain, yaitu HuMa dan mitranya, dikhususkan pada pengelolaan data yang lebih kompleks dengan konflik yang mencuat dalam bentuk kejadian-kejadian kekerasan (konflik manifest). Kedua alat ini dirasa cukup efektif dan perlu dikembangkan terus guna merespon permasalahan konflik pertanahan di kawasan hutan. Selain alat yang ada, melalui *Training for Trainer* oleh anggota WG-Tenure, diharapkan dihasilkan cukup banyak tenaga terampil untuk terjun dalam penyelesaian konflik.

Apa kunci sukses WG-Tenure bertahan hampir 7 tahun?

Terletak pada sistem kelembagaannya yang bersifat *ad-hoc*. WG-Tenure tidak berbadan hukum. Anggota mendapatkan penugasan formal dari lembaga masing-masing melalui Surat Keputusan resmi, sehingga komitmen mereka tinggi. Model yang berhasil bukanlah melembagakan WG-Tenure, tetapi mengikat anggota ke dalam WG-Tenure. Badan Pengurus dipilih anggota dan Sekretariat Harian dijadikan pusat koordinasi kegiatan.

Bisa dijelaskan lagi peran ICRAF dalam WG-Tenure?

ICRAF bersama mitra-mitranya memberikan sumbangan substantif berupa hasil-hasil penelitian terapan. Misalnya, metodologi RaTA yang lahir dari kenyataan banyaknya konflik laten di lahan kawasan hutan. Demikian juga metode-metode lain yang dikembangkan ICRAF untuk memperbarui pengetahuan kita dan para pihak yang berkonflik, agar kualitas negosiasi menjadi lebih baik. Bila proses negosiasi menggunakan data-data yang terus diperbarui, maka cara-cara penyelesaian melalui cara kekuasaan dapat sejauh mungkin ditinggalkan.

Buku Panduan RATA dan penjelasan tahap demi tahap mengenai cara penggunaannya di salah satu lokasi penelitian ICRAF di Batang Toru dapat diunduh dari website ICRAF: www.worldagroforestry.org/sea/Publications/index.asp.

Metode HuMa –Win adalah program komputer berbasis Windows yang dikembangkan oleh HuMa dilengkapi dengan buku Manual Pendokumentasian Konflik dan Kekayaan Alam Lainnya (Versi Januari 2008) dan Manual Data Base (Versi Januari 2008). Informasi lanjutan dapat diunduh dari website HuMa: www.huma.or.id.



2nd World Congress of Agroforestry

The Future of Land-Use
23-28 Agustus 2009, Nairobi, Kenya

Sejak akhir tahun 70an, penelitian di bidang agroforestri mulai mendapatkan perhatian dunia. Saat ini, agroforestri telah muncul sebagai satu pilihan sistem pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Potensi agroforestri dalam mewujudkan tujuan berbagai konvensi lingkungan dunia, seperti Tujuan Pembangunan Milenium, juga telah banyak menarik minat para ilmuwan dan pembuat keputusan. Kerjasama berbagai lembaga agroforestri dengan lembaga konservasi hayati terjalin berdasarkan kekhasan masing-masing dalam menjawab persoalan perlindungan keanekaragaman hayati dunia.

Kenya 2009 - 2nd World Congress of Agroforestry diselenggarakan di tengah makin luasnya pengakuan peran agroforestri dan semakin eratnya kerjasama lintas keahlian dalam menjawab persoalan global.

Informasi selengkapnya:
Website: www.worldagroforestry.org/wca2009/
Email: wca2009@cgiar.org

Redaksional

Kontributor

Aunul Fauzi
Jess Fernandez
Andree Ekadinata
Subekti Rahayu
Iwan Kurniawan
Kurniatun Hairiah
Martua Sirait

Editor

Subekti Rahayu
Aunul Fauzi

Desain dan Tata Letak

Vidya Fitriani

World Agroforestry Centre ICRAF Southeast Asia Regional Office

Jl. CIFOR, Situ Gede
Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia
Telp: 0251 8 625 415, 8 625 417; fax: 0251 8 625 416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org

Agroforestri adalah sistem pemanfaatan lahan yang memadukan pohon dengan tanaman lain dan/atau ternak

www.worldagroforestrycentre.org/sea